

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government governance* merupakan hal yang paling mengemuka dalam pengelolaan dan akuntabilitas administrasi publik dewasa ini. Dalam menjalankan praktik akuntansi sektor publik, yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah banyak mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk terwujudnya pemerataan pembangunan, khususnya pemerintah daerah untuk merubah tatanan lembaga publik yang lebih baik di Indonesia (Dwiyanto,2005)

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 sebagai konsekuensi kewenangan otonomi secara luas dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini agar terwujudnya peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal yang ada dan untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam hal kemandirian daerah, maka dari hal tersebut perlu adanya otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk dapat mengurus dan mengatur berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasarkan pada aspirasi dari masyarakat. Disisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan sebuah hak, wewenang, dan kewajiban dari suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam

kepentingan masyarakat. Dalam hal ini otonomi daerah berarti adanya pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi yang bersifat transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya pengelolaan keuangan tersebut, bahwa suatu daerah dituntut untuk menggali potensi pendapatan daerah dan menggunakan potensi pendapatan tersebut dengan efisien dan efektivitas. Keberhasilan otonomi suatu daerah, salah satunya tidak terlepas dari salah satu indikator penting yaitu dalam bidang keuangan untuk menghadapi otonomi daerah.

Pemerintah daerah dalam hal ini adalah pihak yang menjalankan sebuah roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat harus menyampaikan sebuah bentuk laporan pertanggungjawaban yaitu sebuah laporan keuangan atas kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengungkapkan dalam penyajian dan penyusunan suatu laporan keuangan pemerintahan, harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah beserta unit kerja yang ada didalamnya (Mahmudi,2010). Laporan keuangan tersebut berfungsi untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan sebuah keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, belum memahami laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan latar belakang yang berbeda dari para pihak tersebut dan tidak memahami akuntansi.

Padahal informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut, akan berguna bagi mereka di dalam pengambilan sebuah keputusan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan sebuah analisis dalam memahami laporan keuangan tersebut. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan, dapat digunakan berbagai macam metode pendekatan, salah satunya yang paling banyak dan sering digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Analisis keuangan merupakan suatu usaha dalam mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang telah disajikan. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai oleh suatu daerah dari periode sebelumnya. Analisis ini dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai suatu kemandirian daerah dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah, serta berguna untuk melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pendapatan serta pengeluaran yang dilakukan selama beberapa periode tertentu.

Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang merupakan unsur pelaksana dalam urusan pemerintahan, yang mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan, perikanan dan pertanian. Dalam pengelolaan keuangan daerah, oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang belum dilakukan adanya standar dan acuan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien. Maka dari itu, perlu adanya suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai sebuah tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada anggaran tahun berikutnya. Dalam manajemen, pengukuran kinerja berfungsi sebagai suatu alat untuk menilai, apakah strategi yang telah ditetapkan telah

berhasil dicapai. Dari hasil tersebut, dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang dapat memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan. Berdasarkan umpan balik (*feedback*) tersebut, hasil pengukuran kinerja dapat memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam hal perencanaan maupun dalam implementasinya (Sulisworo,2009)

Dalam instansi pemerintahan, pengukuran suatu kinerja keuangan tidak dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio yang didapatkan dari laporan keuangan pada perusahaan atau sektor swasta pada umumnya. Hal ini disebabkan karena pada instansi pemerintahan tidak berorientasikan pada laba (*net profit*). Penilaian kinerja pada pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan, dipenuhi dengan cara menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan program yang dilaksanakan DPRD dan juga kelompok masyarakat yang memang ingin mengetahui dan menilai kinerja dari pemerintah tersebut.

Salah satu alat yang dapat menganalisis kinerja suatu keuangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah yang dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya. Melalui analisis keuangan daerah, dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam hal penyelenggaraan desentralisasi, menilai kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam

membelanjakan pendapatan daerahnya dan dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan dari pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama beberapa periode tertentu (Anastasia, 2012).

Menurut Halim (2007), terdapat pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah yaitu (1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat), (2) Pihak eksekutif yang berwenang dalam menyusun APBD berikutnya, (3) Pemerintah Pusat/Provinsi sebagai pengawas dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dan (4) Masyarakat sebagai pihak yang akan turut memiliki saham.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah pada Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang berdasarkan rasio keuangan selama periode tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah pada Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang berdasarkan rasio keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari dan diperoleh, selain itu juga untuk memperkuat pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pola pikir ilmiah serta untuk meningkatkan kompetensi dalam sektor akuntansi publik.

2. Bagi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta wacana dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Bagi Universitas Andalas

Sebagai tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan memperdalam mengenai masalah penelitian ini dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya masalah kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Metode Analisa Hasil Penelitian

Analisa data merupakan cara untuk mengolah data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data. Adapun tujuan dari analisa data yaitu untuk mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yang melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif menurut (Suliyanto,2005) yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Dalam hal ini data kuantitatif berupa data yang berhubungan dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA).

Penelitian ini menggunakan data sekunder, menurut Suliyanto (2005), data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA).

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut: dokumentasi, dilakukan dengan mengadakan pengumpulan data dari Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA). Selanjutnya, studi pustaka menurut Sugiyono (2012), merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini yang sangat membantu dalam penyusunan tugas akhir.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Pada kegiatan magang ini penulis memilih kinerja dari Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang beralamat di Jalan Muara No. 51 A Padang Kec Padang Barat, sebagai tempat magang dengan waktu pelaksanaan magang berlangsung selama 40 hari kerja mulai bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari laporan magang ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan magang dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan penjelasan mengenai teori-teori dan konsep dasar yang berkaitan dengan topik yaitu : Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Struktur APBD, Pengertian Keuangan Daerah, Pengertian Laporan Keuangan Daerah, Defenisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan, Analisis Rasio Keuangan, Jenis-Jenis Rasio Keuangan Daerah dan Kerangka Berfikir

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisikan uraian yang berkaitan dengan deskripsi, sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisikan laporan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan selama proses

magang dan pembahasan tentang analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan sebagai alat ukur kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang timbul berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kegiatan magang di Dinas Perikanan dan Pangan.

